

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2020, reuni yang mempertemukan antara Ipong Muchlissoni dengan Sugiri Sancoko menjadi fenomena politik yang menarik untuk dibahas. Kedua nama tersebut pernah bersaing pada pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2015. Namun, yang menjadi perbedaan adalah ketika pilkada tahun 2015 pasangan calon bupati dan wakil bupati berjumlah 4 pasangan calon, sedangkan pada tahun 2020 yang lalu hanya tersisa dua nama tersebut. Keduanya sama-sama memiliki kekuatan politik. Data dari (KPU Ponorogo, 2015) menunjukkan bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara antara Ipong Muchlissoni dengan Sugiri Sancoko tidak begitu signifikan. Ipong yang pada saat itu berpasangan dengan Soedjarno hanya unggul 2,57% suara di atas Sugiri Sancoko yang berpasangan dengan Sukirno.

Kemudian, hasil tidak terduga terjadi pada pilkada 2020 yang kembali mempertemukan kedua nama tersebut. Namun, kali ini dengan pasangan calon wakil yang berbeda. Ipong Muchlissoni berpasangan dengan Bambang Tri Wahono, sedangkan Sugiri Sancoko berpasangan dengan Lisdyarita. Dalam hal ini, pasangan Ipong-Bambang di atas kertas sedikit diuntungkan, karena hadir sebagai calon bupati petahana atau *incumbent*. Namun, fakta berkata lain. Hasil perolehan suara menunjukkan Sugiri-Lisdyarita unggul telak atas Ipong-Bambang. Hasil penetapan (KPU Ponorogo, 2021) menunjukkan bahwa pasangan Sugiri-Lisdyarita memperoleh 352.047 suara. Tentunya, hal tersebut tidak lepas dari dukungan

segenap tim sukses, mulai perorangan, hingga organisasi atau lembaga. Termasuk di dalamnya organisasi kemasyarakatan Islam Muhammadiyah yang ikut menjadi bagian dan ambil peran dalam pesta demokrasi 5 tahunan tersebut.

Berbicara mengenai Muhammadiyah dan politik, meskipun Muhammadiyah tidak terlahir dengan wajah politik, namun Muhammadiyah memiliki falsafah dan gerakan politik kebangsaan, sebagaimana menurut Prof. Amien Rais sebagai *high politics*. Juga, seiring perkembangannya, persinggungan Muhammadiyah dengan politik tidak dapat dihindarkan. Dalam politik, Muhammadiyah memiliki peran politik yang tercermin dalam gerakannya, yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*. Ini sudah sesuai dengan khittah gerakan Muhammadiyah. Khittah politik Muhammadiyah *amar maruf nahi munkar* diartikan dan diimplementasikan dalam arti yang sebenarnya, (Harsono, 2018).

Dalam dua dekade terakhir, misalnya, lebih tepatnya pasca reformasi, wajah politik Muhammadiyah seperti mengalami reorientasi gerakan. Runtuhnya rezim otoritarianisme di era orde baru, seakan membuka kran politik yang lebih terbuka dan anti monolitik. Hadirnya nama-nama tokoh seperti Amien Rais, merupakan babak baru warna politik Muhammadiyah. Yang mana dalam Tanwir Muhammadiyah di Kota Semarang tahun 1998, memutuskan dan memberikan restu kepada Amien Rais, yang mana pada saat itu Amien Rais bertindak sebagai Ketua PP Muhammadiyah untuk melakukan ijtihad politik mendirikan partai politik PAN, (Argenti, 2018).

Kemudian, lahirnya partai-partai yang cukup terbilang baru juga cukup berimbas pada tubuh Muhammadiyah. Adanya partai-partai baru yang dibidani oleh mantan elite dan aktivis Muhammadiyah tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan internal Muhammadiyah. Di lain sisi, narasi yang menyebut bahwa di dalam Muhammadiyah sendiri terjadi kecenderungan yang majemuk dalam menyikapi politik praktis benar terjadi. Beberapa warga Muhammadiyah yang konsisten dengan Khittah Denpasar 2002, kemudian menganggap bahwa urusan politik hanya urusan duniawi yang penuh dengan kepentingan pragmatis tentu bertolak belakang dengan pemahaman warga Muhammadiyah yang memandang politik sebagai salah satu bagian dari pada jihad keagamaan, (Tanthowi, 2019).

Keberadaan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai motor penggerak konstituen tidak dapat dilepaskan dari iklim politik praktis, seperti halnya pemilihan kepala daerah. Dapat kita ketahui bersama, bahwa organisasi masyarakat memiliki pimpinan, anggota, warga, hingga simpatisan yang tidak sedikit. Maka dari itu, proses pendekatan daripada calon pimpinan daerah terhadap lembaga maupun organisasi masyarakat tentunya adalah hal umum untuk ditemui dalam agenda-agenda politik praktis, seperti halnya pilkada.

Namun demikian, netralitas organisasi kemasyarakatan Islam seperti halnya Muhammadiyah menjadi sesuatu yang mutlak. Misalnya, pada pilkada Kabupaten Ponorogo. PDM Ponorogo sudah menyatakan sikap netral pada perhelatan pilkada tahun 2020. Sebagaimana dirangkum oleh (Gema Surya FM, 2020) Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo pada saat itu, Maftuh Bahrul Ilmi, menyatakan sikap tersebut dengan tidak mendukung kedua pasangan calon bupati. Namun, beliau tetap mendorong warga, kader, hingga simpatisan untuk terjun ke mewarnai

panggung demokrasi tersebut. Karena itu mutlak hak dari pada pribadi masing-masing.

Berangkat dari pernyataan tersebut, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo sebagai representasi wajah Muhammadiyah Ponorogo wajar menyatakan sikap-sikap yang sesuai dengan prinsip politik organisasi. Namun, ada satu hal yang ingin dikaji lebih jauh. Yakni mengenai perilaku-perilaku politik elite dan keberadaannya di dalam tubuh organisasi tersebut. Dijelaskan dalam (Efendi, 2014) menyebut bahwa elite Muhammadiyah merupakan sekumpulan orang atau individu yang sedang atau pernah menjabat/berada di pucuk atas pimpinan organisasi baik di level pusat atau wilayah/daerah. Kemudian lebih jauh, Haedar Nashir, dalam bukunya “Perilaku Politik Elite Muhammadiyah” menjelaskan mengenai elite Muhammadiyah. Nashir menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan elite Muhammadiyah itu sendiri adalah, orang-orang yang terkemuka atau bisa disebut memiliki ketokohan, dan kemudian mereka menduduki posisi teratas secara formal dan organisasi. Tidak hanya itu, mereka juga berperan dalam menentukan kebijakan organisasi. (Nashir, 2000) Tentu, berangkat dari pernyataan-pernyataan tersebut, posisi elite di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo adalah orang-orang yang menduduki jabatan struktural di tubuh organisasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo.

Kemudian, dalam beberapa kesempatan sebelum pemilihan langsung dilaksanakan, kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo mendapatkan kunjungan dari kedua paslon Bupati. Paslon Sugiri-Lisdyarita, mengawali kunjungan tersebut, lebih tepatnya pada Agustus 2020. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo beserta jajaran pimpinan dan segenap Pimpinan Cabang

Muhammadiyah (PCM) yang berada di tingkat kecamatan turut hadir dalam acara bertajuk silaturahmi tersebut. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo dalam forum tersebut menerima dengan baik kunjungan Sugiri dan segenap tim. Kemudian, inti dari forum singkat tersebut, bahwa kedatangan Sugiri Sancoko beserta segenap rombongan yang hadir, ingin meminta doa restu dan dukungan kepada segenap warga Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, Ketua PDM menyampaikan dukungan moril kepada Sugiri-Lisdyarita, bahwa Muhammadiyah akan mendukung, karena secara kepentingan bersama, Muhammadiyah berkepentingan untuk memiliki pemimpin yang baik. Kemudian juga disampaikan Ketua PDM Namun tetap, sebagai organisasi non-politik, Muhammadiyah, (Catur, 2020).

Kurang lebih dua bulan kemudian, persisnya pada tanggal 1 Oktober 2020, kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo kembali mendapat kunjungan. Kali ini pasangan calon bupati Ipong-Bambang hadir bersama segenap tim dan rombongan. Tidak jauh berbeda dengan Sugiri-Lisdyarita, Ipong-Bambang juga membawa misi untuk menyambung silaturahmi dan mohon doa restu kepada Muhammadiyah. Namun, dalam kesempatan tersebut ada hal yang cukup menarik. Yakni sebagai paslon yang berangkat dari kubu petahana, Ipong turut menyampaikan capaian-capaian yang sudah dilakukan selama menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Dalam hal ini, dapat dibaca agar supaya ke depan, kepercayaan masyarakat Ponorogo, khususnya warga Muhammadiyah terhadap kepemimpinan Ipong terus terjaga. Dan melanjutkan kepemimpinan di periode kedua pada pilkada 2020 tersebut.

Kemudian, berangkat dari agenda-agenda politik tersebut, posisi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, sebagai organisasi, tetap menunjukkan sikap politik yang netral. Tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. Namun, di lain sisi juga tidak menutup kemungkinan bahwa elite atau pimpinan yang ada di dalam tubuh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo memiliki pandangan politik yang majemuk, tidak sama. Artinya, elite-elite yang ada di strukturasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo memiliki pilihan politik. Akan tetapi, terlepas dari individuasi sosok, elite Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo juga membawa nama besar dan ketokohan Muhammadiyah. Juga, pandangan politik yang majemuk tersebut tentu akan terwujud dalam perilaku-perilaku politik yang dilakukan oleh para elite Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo.

Fakta-fakta tersebut hanyalah sedikit temuan yang dirangkum penulis. Namun, berangkat dari realitas yang terjadi di lapangan, semakin menjadikan penelitian ini menarik untuk dibahas. Meskipun penelitian tentang perilaku politik sudah sering dibahas, namun dalam penelitian ini penulis menitik fokuskan kajian penelitian pada perilaku politik yang dilakukan oleh elite. Terlebih, studi kasus tersebut dilakukan pada organisasi masyarakat Islam Muhammadiyah pada wilayah kota atau kabupaten. Yang mana, persoalan secara jelas dapat dirasakan secara langsung oleh warga Persyarikatan Muhammadiyah akar rumput.

Sebagai organisasi Islam yang bercorak modernis, posisi dan identitas Muhammadiyah hari ini semakin mengalami dinamika progresif. Terutama kajian yang membahas tentang gerakan politik yang dilakukan Muhammadiyah secara organisasi. Selama ini, Muhammadiyah sering dimaknai sebagai organisasi yang

hanya berfokus dalam gerakan-gerakan filantropi, gerakan-gerakan kemanusiaan. Namun lebih dari itu, posisi Muhammadiyah, dengan kader bangsanya juga berperan dalam posisi-posisi strategis kebangsaan, (Nashir, 2000). Maka kemudian, identitas, posisi, dan peranan tersebut lah yang membuat seorang Peacock menyebut bahwa Muhammadiyah telah menjadi sebuah pergerakan Islam terbesar di Asia Tenggara, (Peacock, 2016).

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian di atas, selanjutnya rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana perilaku politik yang dilakukan oleh elite Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Ponorogo dalam pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2020”

C. Tujuan Penelitian

Dengan uraian rumusan masalah di atas, selanjutnya tujuan penelitian yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yaitu, “Menganalisa perilaku politik elite Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo dalam pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2020”

D. Manfaat Penelitian

Adapun, dengan adanya penelitian ini, penulis berharap:

1. Dapat bermanfaat bagi lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan secara khusus sebagai salah satu bentuk karya ilmiah yang dapat digunakan sebagai sumber atau rujukan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Dapat bermanfaat bagi lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik secara umum sebagai salah satu bentuk karya ilmiah yang dapat digunakan sebagai sumber atau rujukan pada penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Dapat bermanfaat bagi penulis, sebagai minat kajian dalam diskursus ilmu politik secara luas dan objek kajian organisasi besar Muhammadiyah secara mendalam.
4. Dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan masyarakat Muhammadiyah, sebagai hasil kajian mendalam akan berbagai permasalahan yang terjadi dalam organisasi Muhammadiyah.

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. Perilaku Politik

Studi mengenai perilaku politik secara terminologis dijelaskan Ramlan Subakti, sebagaimana dikutip oleh (Lestari, 2017) bahwa perilaku politik merupakan sebuah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga, dan kelompok-kelompok individu dengan masyarakat. Yang kesemuanya itu memiliki tujuan-tujuan seperti dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, penegakan keputusan politik.

b. Muhammadiyah

Dijelaskan dalam (Nashir, 2014) Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi masyarakat Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan tujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Muhammadiyah juga merupakan gerakan Islam yang

melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

c. Elite Muhammadiyah

Dalam (Nashir, 2000) pengertian elite Muhammadiyah adalah, orang-orang terkemuka yang memiliki ketokohan, dan mereka menduduki posisi teratas secara formal dan organisasi. Selain menduduki jabatan tertinggi dalam suatu wilayah kepemimpinan Muhammadiyah, mereka pun juga memiliki peran untuk menentukan kebijakan-kebijakan organisasi.

d. Pemilihan Kepala Daerah

Secara umum, dijelaskan dalam (M.Noor Aziz, 2011) bahwa pengertian dari pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebuah pemilihan umum yang diselenggarakan untuk kemudian memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui penjabaran tersebut, dapat ditangkap dengan jelas penegasan konseptual dan pengertian dari apa yang dimaksud dengan pemilihan kepala daerah itu sendiri.

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang sudah terdeskripsikan di atas, maka dapat disederhanakan, secara operasional, apa yang kemudian dimaksud dengan “Analisis Perilaku Politik Elite Pimpinan Daerah

Muhammadiyah Ponorogo dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2020” adalah bagaimana penelitian ini akan menganalisis perilaku politik yang dilakukan oleh elite di dalam organisasi Muhammadiyah. Selanjutnya, yang dimaksud elite Muhammadiyah itu sendiri yaitu orang-orang yang menduduki jabatan struktural di tubuh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo dan memiliki peran untuk membuat dan mengambil suatu keputusan. Kemudian, elite-elite tersebut di dalam prosesnya ada keterlibatan secara individual maupun organisasi, kaitannya dengan pemilihan kepala daerah Kabupaten Ponorogo yang digelar pada tahun 2020.

F. Landasan Teori

Pada kajian teori ini, penulis akan menguraikan sumber rujukan dan teori yang diambil, kemudian teori-teori tersebut menjadi landasan untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

1. Perilaku Politik

Dalam penyebutan istilah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perilaku merupakan tanggapan atau reaksi yang dilakukan oleh individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Ketika pengertian tersebut kita pahami lebih luas, dalam konteks politik misalnya, dapat dipahami dengan sederhana bahwa politik menjadi faktor yang menyebabkan individu melakukan tanggapan dan reaksi atas fenomena dan realitas yang terjadi di hadapannya. Kajian mengenai teori perilaku politik merupakan bagian yang tidak bisa terlepas dari pemikiran kaum *behavioralisme*. Mereka menganggap, politik tidak akan bisa dilepaskan dari pola perilaku-perilaku yang ada di dalamnya, (Lestari, 2017).

Kemudian, pertanyaan sering yang muncul dari pembahasan perilaku politik adalah, siapa sebenarnya pelaku dari pada perilaku politik itu sendiri. Muncul dua hal, yaitu perilaku individu atau lebih mengarah ke dalam perilaku struktur. Dalam (Lestari, 2017) dijelaskan, bahwa ketika menggunakan pendekatan *behavioralisme*, aktor individu dipandang secara aktual berperan melakukan kegiatan politik. Sedangkan perilaku politik organisasi atau struktur, lebih mengarah kepada perilaku politik yang dilakukan oleh individu menggunakan pola-pola tertentu yang ada di dalamnya.

Selanjutnya, Miftah Toha, sebagaimana dikutip dalam penelitian (Lestari, 2017) menjelaskan, bahwa perilaku organisasi adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu yang terjadi di dalam organisasinya. Maka kemudian, untuk memahami perilaku dari pada organisasi, terlebih dahulu harus mengetahui perilaku politik dari pada individu sebagai pendukung organisasi tersebut.

Dalam hal ini, perilaku politik individu akan menjadi acuan dasar, bagaimana penjabaran akan pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah perilaku politik yang dilakukan oleh individu maupun aktor politik akan dibahas dalam tahap ini. Masih sama, seperti yang sudah terjabarkan di dalam penegasan istilah, bahwa perilaku politik merupakan sebuah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga, dan kelompok-kelompok individu dengan masyarakat. Yang kesemuanya itu memiliki tujuan-tujuan seperti dalam

rangka proses pembuatan, pelaksanaan, penegakan keputusan politik, (Lestari, 2017)

Setelah memahami pengertian dalam perilaku politik, selanjutnya adalah menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi aktor politik maupun elite politik dalam merencanakan hingga mengambil keputusan politik. Dalam hal ini kitab bisa menyebutnya sebagai sebuah perilaku politik. Yang mana dalam hal ini, Miriam Budiarjo mengkategorikannya menjadi empat bagian. Dijelaskan oleh Miriam Budiarjo, sebagaimana dikutip dalam penelitian (Lestari, 2017) bahwa faktor yang mempengaruhi aktor politik yaitu, *pertama*, faktor lingkungan politik tidak langsung, artinya faktor lingkungan politik tidak langsung adalah seperti halnya sistem politik negara hingga sistem ekonomi yang ada dalam pemerintahan di negara. *Kedua*, faktor lingkungan politik langsung, misalnya faktor keluarga, agama, pendidikan, maupun lingkungan setempat yang membentuk kepribadian dari pada aktor politik tersebut.

Selanjutnya, *ketiga*, adalah struktur kepribadian yang dicerminkan oleh sikap individu yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh kepentingan, penyesuaian diri, dan pertahanan diri. Ketiganya tersebut merupakan basis sikap fungsional yang tercermin dalam sikap individu seorang aktor politik..

Kemudian, Muhammadiyah sebagai wadah organisasi yang memiliki budaya politik khittah perjuangan Muhammadiyah yang moderat dan dengan menggunakan model atau perilaku politik yang berkembang di

kalangan elite muslim, Haedar Nashir dalam (Nashir, 2000) merumuskan tiga tipologi dan orientasi perilaku politik elite sebagai berikut:

- a. Perilaku politik idealis, yakni sebuah perilaku politik elite yang memiliki kecenderungan ingin membangun tatanan politik bercorak Islam sebagaimana kaum idealis dengan kecenderungan mengabaikan kerja sama dengan pemerintah dan kekuasaan politik yang lain;
- b. Perilaku politik akomodasionis, yakni sebuah perilaku politik elite yang cenderung mengembangkan kerja sama dan dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian diri terhadap kebijakan pemerintah secara wajar dan tetap kritis tanpa rerintegrasi atau terkooptasi oleh kekuasaan pemerintah;
- c. Perilaku politik pragmatis, yakni perilaku politik elite yang cenderung mengintegrasikan diri dalam struktur kekuasaan dan kepentingan pemerintah atau politik yang berkuasa dan seringkali kehilangan sikap moderat atau daya kritis terhadap kekuasaan.

2. Teori Elite

Pengistilahan elite berasal dari bahasa Inggris "*elite*" kemudian juga dalam Bahasa Latin "*eligere*", yang memiliki arti memilih. Istilah elite tersebut semenjak kemunculannya pada abad ketujuh belas digunakan untuk menyebut barang-barang dagangan secara khusus dan barang tersebut memiliki keutamaan tertentu. Juga kemudian digunakan untuk menyebut

kelompok sosial tinggi seperti kaum bangsawan atas atau kesatuan militer tertentu, (Nashir, 2000).

Semenjak kelahiran filsuf Yunani kuno, pemikiran tentang elite sudah mendapat banyak perhatian. Aristoteles, misalnya, mendefinisikan elite sebagai sejumlah kecil individu atau kelompok kecil yang mana memiliki tugas memikul semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Dalam penjelasan tersebut akhirnya diperluas pemaknaan dan pengertiannya oleh sosiolog politik asal Italia Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca, (Nuzula, 2016).

Vilfredo Pareto (1848-1923), sebagaimana dikutip dalam (Nuzula, 2016) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan elite adalah sekelompok orang yang berhasil dan mampu dalam menduduki sebuah jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Lain dari pada hal tersebut, Pareto juga percaya, bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik. Lebih jauh, dikutip dalam penelitian (Lestari, 2017) Robert Putnam mendefinisikan elite sebagai sekelompok orang yang memiliki kekuasaan politik yang lebih dibandingkan dengan yang lain.

Kemudian, Gaetano Mosca (1858-1941), sebagaimana dikutip oleh (Lestari, 2017) mendefinisikan bahwa dalam setiap masyarakat, setidaknya terdapat dua kelas penduduk. Yakni, kelas yang menguasai dan kelas yang dikuasai. Kelas yang dikuasai jumlahnya selalu lebih banyak. Sedangkan kelas penguasa, memiliki kecenderungan jumlah yang sedikit, terbatas, dan

menjalankan fungsi-fungsi politik. Kelas yang sedikit dan menguasai tersebut yang sering dikatakan sebagai kelompok elite.

Selanjutnya, dari berbagai pemaparan akan definisi elite di atas, teori yang paling relevan dengan penelitian ini adalah teori yang diungkapkan oleh Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca. Keduanya memiliki pandangan bahwa pengertian dari pada elite adalah kelompok kecil yang memiliki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Kemudian, ketika dikontekstualisasikan dengan penelitian ini adalah pimpinan yang ada di dalam organisasi Muhammadiyah. Yang mana, dalam hal ini berada dalam strukturasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo.

Kemudian, elite Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo tersebut akan dikelompok menjadi beberapa berdasarkan identitas individu. Meminjam pengelompokan elite Muhammadiyah dalam (Nashir, 2000) dalam melakukan penelitian ini, penulis nantinya akan menggunakan identitas elite di bawah sebagai karakteristik yang akan diteliti. Di antaranya adalah:

- a. Elite ulama, yakni elite Muhammadiyah yang secara khusus memiliki karakteristik seorang pendakwah dan tokoh agama.
- b. Elite politik, yakni elite Muhammadiyah yang secara khusus memiliki keterkaitan dengan posisi atau jabatan politik di pemerintahan, maupun partai politik.
- c. Elite birokrat, yakni elite Muhammadiyah yang secara khusus memiliki posisi individu sebagai birokrat atau pekerjaan utama sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berangkat dari pengelompokan identitas elite di atas, yang kemudian disebut elite Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo nantinya akan dikelompokkan menjadi tiga kelompok tersebut. Yang mana, akan dijadikan subjek penelitian, dalam kaitannya dengan perilaku-perilaku politik yang dilakukan sepanjang pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2020.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pengertian dari keseluruhan hal-hal yang akan digunakan dalam penelitian, misalnya, variabel dan istilah. Dalam hal ini, definisi operasional berfungsi untuk memberikan gambaran pengukuran variabel peneliti dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Perilaku Politik Elite PDM Ponorogo

Sebagaimana dikutip dalam (Lestari, 2017) mengenai perilaku politik, yang dipaparkan oleh Ramlan Subakti, bahwa perilaku politik dapat dipahami sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga, dan kelompok-kelompok individu dengan masyarakat. Yang kesemuanya itu memiliki tujuan-tujuan seperti dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, penegakan keputusan politik. Dan kemudian, perilaku politik yang dilakukan oleh elite Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo dalam pilkada dapat dipahami dengan dasar konsep perilaku politik di atas. Selanjutnya, menurut Miriam Budiarjo, dalam penelitian (Lestari, 2017) faktor yang mempengaruhi perilaku politik antara lain:

- a. Faktor politik tidak langsung;
- b. Faktor politik langsung;
- c. Faktor struktur kepribadian;

Artinya, dalam penelitian ini, penulis akan memakai ketiga faktor tersebut, untuk membantu menganalisa dan mencari informasi maupun data yang berkenaan dengan perilaku politik elite PDM Ponorogo.

2. Elite PDM Ponorogo dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2020

Untuk membantu menganalisa perilaku elite Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2020, penulis disini menggunakan teori elite yang mana dipaparkan oleh Vilfredo Pareto (1848-1923) dan Gaetano Mosca (1858-1941). Keduanya memiliki kecenderungan bahwa elite dapat dipahami sebagai kelompok kecil yang memiliki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat, (Lestari, 2017). Selanjutnya, apabila definisi tersebut dikontekstualisasikan dengan variabel elite Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, dapat disederhanakan bahwa elite di sini merupakan sekelompok orang yang menduduki jabatan tertinggi di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, meliputi ketua, sekretaris, bendahara, atau wakil ketua yang membidangi bidang-bidang tertentu. Tidak hanya itu, dapat disebut elite juelite-elite PDM tersebut memiliki peran dan keterlibatan dalam pilkada Kab. Ponorogo tahu 2020.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena penelitian ini menggunakan manusia sebagai instrumen dan berusaha menelaah fenomena sosial yang berlangsung secara wajar atau alamiah. Kemudian, pengertian metode deskriptif menurut Arikunto, sebagaimana dikutip dalam (Habibullah, 2013) menjelaskan bahwa penelitian tersebut dimaksudkan untuk menyelidiki suatu keadaan, kondisi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain. Selanjutnya, melalui pendekatan deskriptif tersebut, penulis akan mencari data tersebut berupa informasi yang disampaikan oleh informan, yakni para elite yang menduduki jabatan teratas di tubuh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan sebagai “pusat pemerintahan”, manajemen, koordinasi, konsolidasi, dan komunikasi organisasi secara struktural, dengan asumsi bahwa mesin organisasi berjalan dengan baik dan segala hal terkait politik selalu dikoordinasi secara struktural di level daerah. Selain itu, di level daerah ini dianggap elite atau pimpinan yang mempunyai pengaruh dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Ponorogo 2020 yang memang mengalami dinamika baik secara individual atau organisasi/kelompok tertentu, (Efendi, 2014).

3. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* sendiri merupakan sebuah metode guna menentukan informan pada sebuah penelitian. Menurut Sugiyono, sebagaimana dikutip oleh (Habibullah, 2013) dijelaskan, bahwa metode *purposive sampling* adalah sebuah teknik dalam penentuan sampel, yang mana dalam penentuan sampel tersebut menggunakan suatu kriteria tertentu. Kemudian, masih dalam penelitian (Habibullah, 2013) Arikunto mengategorikan beberapa kriteria dalam metode *purposive sampling*, di antaranya:

- a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri – ciri, sifat – sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri – ciri pokok populasi;
- b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar – benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri – ciri yang terdapat pada populasi;
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

Meminjam konsep subjek informan yang mana dijelaskan dalam (Nashir, 2000) berikut pengkategorian elite Muhammadiyah yang akan dijadikan informan penelitian:

- a. Elite ulama, yakni elite Muhammadiyah yang secara khusus memiliki karakteristik seorang pendakwah dan tokoh agama.

- b. Elite politik, yakni elite Muhammadiyah yang secara khusus memiliki keterkaitan dengan posisi atau jabatan politik di pemerintahan, maupun partai politik.
- c. Elite birokrat, yakni elite Muhammadiyah yang secara khusus memiliki posisi individu sebagai birokrat atau pekerjaan utama sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Berangkat dari pemaparan kriteria di atas, penulis melakukan wawancara kepada elite Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo sebagai objek dari pada penelitian perilaku. Pada penelitian ini, penulis menentukan informan tersebut yang dianggap layak untuk memberikan segala informasi yang berkaitan dengan perilaku politik elite Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo dalam pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2020.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada dua sumber, yaitu sumber data primer (*primary data*) dan sumber data sekunder (*secondary data*)

a. Data Primer

Menurut (Arikunto, 2013) yang dimaksud dengan data primer adalah data yang yang dikumpulkan melalui pihak pertama. Dan, biasanya dapat melalui wawancara, jajak pendapat, dan lain-lain. Informan data primer ini meliputi: ketua, sekretaris, dan bidang-bidang organisasi tertentu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang diangkat.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder menurut (Arikunto, 2013) merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum dilakukan penelitian. Juga, dijelaskan bahwa yang dikategorikan sebagai data sekunder, misalnya melalui catatan atau arsip perusahaan dengan cara membaca, mempelajari dan memahaminya. Dalam data sekunder penelitian ini berupa dokumen pribadi, buku- buku referensi, jurnal atau artikel yang terkait erat dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses di mana peneliti mengumpulkan data-data responden yang mana kemudian akan dijadikan data empirik dalam proses analisis data. Kemudian, dijelaskan dalam (Sugiyono, 2012) maksud dari pada pengumpulan data sendiri dapat diartikan sebagai salah satu langkah dalam metode ilmiah, yang mana kemudian data yang diperoleh dianalisis dan diolah dengan metode tertentu yang kaitanya dengan masalah yang akan diteliti. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian:

a. Wawancara

Sedangkan wawancara menurut Ulber Silalahi, sebagaimana dalam penelitian (Arikunto, 2013) merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah

informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan kepada: pimpinan organisasi otonom daerah Muhammadiyah Ponorogo dan pihak-pihak yang terlibat di dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Ponorogo 2020. Wawancara tersebut berupa tanya jawab dimana penulis menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebagai dasar wawancara.

b. Dokumentasi

Dijelaskan oleh Mahi. M. Hikmat dalam (Arikunto, 2013) bahwa apa yang dimaksud dengan teknik dokumentasi adalah teknik penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Teknik tersebut penulis gunakan untuk memperoleh data penting tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian seperti: letak geografis, struktur organisasi, gambar-gambar keadaan lingkungan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan organisasi otonom diperlukan guna melengkapi data. Data yang terkumpul selanjutnya dipilih dan dipilah untuk disistematisasi.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, yang digunakan penulis dalam analisis data ini dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif, disebutkan Kriyantono dalam (Akhmad, 2015) merupakan sebuah teknik analisis data yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang

keadaan sebenarnya. Kemudian secara spesifik, teknik analisis data deskriptif kualitatif tersebut menggunakan model interaktif. Dijelaskan Miles dan Huberman dalam (Ajif, 2013) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Lebih jauh, berikut penjelasan lengkap model interaktif:

a. Tahap Reduksi Data

Dalam tahap reduksi data, seperti yang disampaikan Miles dan Huberman sebagaimana dikutip dalam penelitian (Ajif, 2013) bahwa tahap ini dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Pada akhirnya, dalam tahap reduksi data tersebut, merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa. Sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Tahap Penyajian Data

Selanjutnya, dalam tahap penyajian data Miles dan Huberman sedikit membatasi bahwa suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Miles dan Huberman pun meyakini, bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan.

c. Tahap Penarikan Kesimpulan

Kemudian, yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini, menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip dalam penelitian (Ajif, 2013) menyebutkan bahwa penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan tersebut nantinya juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

